

## PERKEMBANGAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU

Adnan Affan Akbar Botanri<sup>1</sup>, Frans Waas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pattimura, Kota Ambon*

<sup>2</sup>*Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pattimura, Kota Ambon*

*Email korespondensi : abotanri@gmail.com*

### ABSTRAK

Perencanaan Wilayah dan Kota merupakan keilmuan yang telah lama di Indonesia. Perkembangan keilmuan ini dimulai dari ITB, UNDIP, kemudian diikuti universitas lainnya. Obyek perencanaan dari bidang PWK ialah ruang yang dijabarkan dengan lengkap dalam UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah di timur Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir perkembangan keilmuan PWK-nya belum seluruh daerah paham terkait urgensinya. Tujuan penulisan ini adalah menceritakan terkait sejarah penataan ruang di Indonesia, perkembangan PWK di Indonesia, dan perkembangan PWK di Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan yakni deskripsi kualitatif. Kemudian dengan data berupa informasi dari buku, artikel, peta serta dokumen lainnya sebagai langkah awal untuk dijabarkan terkait perkembangan keilmuan PWK di Maluku. Pembahasan pertama penulisan ini yakni terkait praktik perencanaan di Indonesia yang dipengaruhi beberapa faktor yakni perkembangan paradigma perencanaan di dunia, perubahan pemerintahan, perkembangan pendidikan dan pelatihan, pengaruh dan aliran perencanaan luar negeri, perkembangan kelembagaan, dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pembahasan berikutnya yakni perkembangan PWK di Indonesia dimulai dari ITB hingga saat ini berjumlah 74 sekolah perencana dari tingkatan S-1 hingga S-3 yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan data keanggotaan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia dan ASPI sebagai organisasi yang terkait dengan PWK terus mengalami perkembangan dan dengan Permen ATR nomor 15 tahun 2021 terkait Forum Penataan Ruang sehingga perlu melibatkan 2 organisasi tersebut dalam penataan ruang di daerah. Yang terakhir yakni perkembangan PWK di Maluku dimulai dengan dibukanya program studi PWK di Universitas Pattimura pada tahun 2014 dan terbentuknya IAP Maluku pada tahun 2019. Peran planner Maluku kedepannya dapat membantu dalam penataan ruang di daerah terutama dalam masa pandemi covid-19 yakni diantaranya dengan konsep high density, melakukan rencana penyesuaian ruang publik serta jaringan transportasi untuk Non Motorized Transport dan juga rencana sarana pengolahan limbah B-3 covid-19 di Kota Ambon.

**Kata kunci:** PWK, IAP, ASPI, Covid-19, Provinsi Maluku

### PENDAHULUAN

Perencanaan Wilayah dan Kota atau dulu biasa disebut dengan Planologi merupakan keilmuan yang sudah lama di Indonesia yakni berawal dari berdirinya Jurusan PWK di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1959. Kemudian diikuti oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro yang dibuka pada tahun 1992 dan berkembang menjadi Jurusan di tahun 1999. Kemudian untuk PWK di Universitas Gadjah Mada lebih dulu dibuka untuk Strata-2 yakni Magister Perencanaan Kota dan Wilayah di tahun 1994 kemudian di tahun 2003 dibuka untuk Strata-1. Kemudian juga terdapat bidang PWK lainnya di seluruh Universitas di Indonesia yang berdasarkan data dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), saat ini telah berjumlah 74 sekolah perencana dari tingkatan S-1 sampai S-3.

Obyek perencanaan dari bidang PWK yakni ruang yang menurut UU nomor 26 tahun 2007 ialah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam bidang PWK

dikenal 3 cakupan ruang yakni mikro, mezo dan makro, namun PWK hanya menangani mezo ke makro saja, sedangkan mikro ke mezo dalam bidang arsitek yang masih serumpun dengan bidang PWK (Djunaedi, 2014).

Keilmuan PWK bersifat multidisipliner yang artinya menggabungkan berbagai macam keilmuan. Sehingga kita tidak hanya membahas keilmuan teknik, tetapi juga kelautan, geografi, hukum, pertanian, kehutanan, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, bahkan hal-hal yang menarik seperti kota berkelanjutan, smart city, dan hal-hal terkait perencanaan kota dan wilayah lainnya. Djunaedi (2018) menyampaikan terkait kota/kabupaten cerdas adalah suatu layanan perkotaan melalui pendayagunaan sumberdaya TIKOM yang diselenggarakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dengan para stakeholder dalam lingkup suatu wilayah (baik berbentuk provinsi/kabupaten/kota) yang secara sosiologis, geografis, dan administratif memiliki karakter perkotaan dan memiliki standar tertentu untuk menggerakkan pemerintah, publik, serta bisnis, untuk lebih efisien, tepat sasaran, saling terintegrasi, dan juga bersifat visioner dengan menggunakan potensi TIKOM, SDM, dan juga ekosistem. Kemudian Muta'ali (2019) menyampaikan terkait kota berkelanjutan yakni kemampuan area perkotaan dan daerahnya untuk terus berfungsi pada tingkatan kualitas hidup yang diinginkan oleh masyarakatnya, dengan tidak membatasi pilihan yang ada sekarang saja namun sampai generasi masa yang akang datang dan tidak menyebabkan dampak negatif di dalam maupun di luar batas perkotaan.

Provinsi Maluku sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang turut mulai mengembangkan keilmuan PWK. Namun berdasarkan pengalaman penulis yang pernah bekerja di salah satu daerah di Provinsi Maluku sekitar tahun 2013, ketika berdiskusi dengan Kepala Dinas dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut, beliau tidak tahu bahwa ada keilmuan PWK. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum secara keseluruhan daerah paham terkait urgensi dari keilmuan PWK ini. Padahal dengan adanya Peraturan Pemerintah terbaru yakni PP nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai peraturan pelaksana dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahkan dengan Permen ATR nomor 15 tahun 2021 terkait pembentukan Forum Penataan Ruang yang keanggotaannya perlu melibatkan asosiasi profesi yakni Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dan juga asosiasi akademisi yakni Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), sehingga tentu saja seluruh daerah perlu paham dengan baik keilmuan ini agar dapat terbentuk tim yang paham terkait penataan ruang sehingga dapat menciptakan ruang yang baik bagi seluruh masyarakatnya. Tujuan dari penulisan ini ialah menceritakan terkait sejarah penataan ruang di Indonesia, perkembangan PWK di Indonesia, dan perkembangan PWK di Provinsi Maluku.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan yakni deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan peristiwa, sebuah proses, dan juga keaslian (Somantri, 2005). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku. Provinsi Maluku sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang mulai melakukan pengembangan terkait bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Hal ini dapat dilihat dari dibukanya program studi PWK di Fakultas Teknik, Universitas Pattimura dan juga terbentuknya Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Maluku.

Jenis metode kualitatifnya ialah metode histori yakni dengan mengkaji sejarah perkembangan penataan ruang maupun PWK di Indonesia serta organisasi terkait bidang

PWK yang telah berdiri sejak lama. Kemudian juga dengan studi dokumen yang banyak dimanfaatkan pada penelitian kualitatif karena sifatnya alamiah, sumber yang stabil dan berguna untuk pengujian dan hasilnya dapat memberikan pemahaman terhadap hal yang diselidiki (Moleong, 2007).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah informasi dari buku, artikel, peta, serta dokumen lainnya. Sehingga langkah pertama yang dilakukan ialah mengumpulkan berbagai informasi terkait bahan kajian kemudian dijabarkan berdasarkan pemahaman penulis terkait perkembangan keilmuan PWK di Indonesia hingga perkembangannya di Provinsi Maluku. Nantinya akan dipetakan sebaran keanggotaan IAP Maluku di berbagai Kota/Kabupaten dengan menggunakan software ArcGis 10.7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Penataan Ruang Di Indonesia

Telah dijabarkan sebelumnya terkait defenisi ruang dan orang awam terkadang ada yang salah menafsirkan bahwa obyek seorang planner ialah kota atau kabupaten saja, bahkan pernah ada formasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bidang PWK yakni penataan taman. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman terkait cakupan ruang dalam PWK tidak dipahami dengan baik. Seperti diceritakan secara singkat sebelumnya terkait cakupan ruang yakni mikro, mezo, dan makro. Bidang PWK hanya fokus ke cakupan ruang mezo hingga ke makro. Mezo ialah ruang dari kawasan sedangkan makro ada ruang dari tingkatan kota, wilayah atau regional bahkan hingga tingkat Negara atau nasional. B. J. Collins dalam Muta’ali (2011) menyampaikan terkait perencanaan dan pengembangan wilayah sebagai pengaturan bangunan dan guna lahan dalam suatu rencana perkembangan perkotaan maupun desa.

Djunaedi (2014) menyampaikan untuk perkembangan praktik perencanaan di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor yakni: 1) Perkembangan paradigma perencanaan di dunia: bermula dari master planning, menjadi rational comprehensive planning, setelah itu strategic planning dan juga participatory planning (Djunaedi, 2012). 2) Perubahan pemerintahan dari Hindia Belanda (Kolonial) hingga Pasca Orde Baru. Tiap pemerintahan mempunyai orientasi politik yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi terjadinya kebijakan penataan ruang yang berbeda. 3) Perkembangan pendidikan dan pelatihan perencanaan, dimulai sekitar tahun 1950 hingga saat ini diadakan pelatihan kedinasan Pekerjaan Umum (tidak terbatas pada penataan ruang) hingga sekitar tahun 1980 sampai sekarang universitas dengan bidang PWK makin meningkat. Selain melalui pendidikan tinggi, terdapat juga Pendidikan dan juga Latihan Jabatan Fungsional Perencana (Diklat JFP) yang dibina oleh BAPPENAS.

Faktor yang ke-4) yakni Pengaruh dari aliran perencanaan luar negeri: sampai sekitar tahun 1950-an penataan ruang di Indonesia dipengaruhi oleh aliran dari Negara Belanda (planologie), terdapat beberapa tahap hingga kemudian menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang yang kemudian berubah namanya menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah. 5) Perkembangan kelembagaan perencanaan, dimulai dengan penataan ruang menjadi urusan teknis dari bidang pekerjaan umum (PU) hingga saat ini menjadi urusan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 6) Perkembangan peraturan perundang-undangan perencanaan yakni sejak tahun 1947-1949, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU Pembentukan Kota dan Pengoperasionalannya (stadsvormingordonantie/SVO dan stadsvorming voor ordening/SVV) hingga akhirnya pada tahun 1992, Negara Indonesia mempunyai UU

pengganti SVO dan SVV yakni UU nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan UU nomor 26 tahun 2007 yang masih digunakan hingga saat ini. Terdapat juga Permen ATR nomor 8 tahun 2017 dan juga nomor 1 tahun 2018, kemudian yang paling terbaru ialah Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki terobosan dalam percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Kabupaten dan Provinsi, integrasi produk rencana tata ruang dengan Online Single Submission (OSS), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pembentukan Forum Penataan Ruang (FPR) di daerah dengan diterbitkannya Permen ATR nomor 15 tahun 2021.

### **Perkembangan PWK Di Indonesia**

Dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 secara eksplisit mensitir bahwa tata ruang Indonesia saat ini dalam keadaan kritis karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti tata ruang (Muta'ali, 2013). Pembangunan tidak mengikuti rencana tata ruang memang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, padahal apabila pembangunan mengacu pada RTRW yang dibuat dengan baik, dapat meminimalisir permasalahan pembangunan yang sering terjadi di daerah seperti permukiman kumuh, banjir, kemacetan, dan masalah lainnya.

Perkembangan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia seperti yang penulis ceritakan sebelumnya, dimulai dengan dibukanya jurusan PWK di ITB kemudian diikuti dengan dibukanya PWK pada universitas lain di seluruh Indonesia. Daftar sekolah perencanaan yang tergabung, dapat dilihat pada website [www.aspi.or.id](http://www.aspi.or.id). Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) merupakan asosiasi sebagai wadah sekolah pendidikan tinggi perencanaan dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan bertujuan untuk bekerjasama secara berkelanjutan dalam mendidik, meneliti, dan mengembangkan ilmu perencanaan yang berkarakter, berpandangan sistematis komprehensif, holistik, memiliki kemampuan preskriptif ke masa depan dalam “menyelesaikan” masalah-masalah pembangunan wilayah dan kota berdimensi ruang dan waktu dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan Negara yang bermartabat.

Sejarah terbentuknya ASPI, lebih dulu bernama Forum Nasional Pendidikan Planologi (FNPP) dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri pada tahun 1996 dirubah lagi menjadi Forum Nasional Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota (FNP-PWK) dan kemudian pada tanggal 30 Maret 2000 di Jakarta dengan 7 program pendidikan S-2 yakni di ITB, UGM, UNHAS, IPB, UNAND, USU dan UNDIP mendirikan ASPI.

Berdasarkan data keanggotaan ASPI, pada tahun 2001 terdapat 21 sekolah perencanaan yang tergabung baik tingkatan S-1 dan S-2. Kemudian di tahun 2002 bertambah 5 sekolah perencana, di tahun 2005 bertambah 3, di tahun 2006 bertambah 7, di tahun 2008 bertambah 1, dan di tahun 2010 bertambah 4, dengan 2 program studi S-3. Setelah itu berdasarkan kongres VI ASPI pada tahun 2011 yang diselenggarakan di Universitas 45 Makassar, bertambah lagi 6 sekolah perencana. Kemudian kongres ASPI VII pada tahun 2013 yang diselenggarakan di Universitas Sam Ratulangi Manado, bertambah lagi 4 sekolah perencana. Kemudian kongres ASPI VIII pada tahun 2015 yang diselenggarakan di Universitas Hindu Indonesia-Bali, bertambah lagi 4 sekolah perencana. Kemudian kongres ASPI IX pada tahun 2017 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Mataram-Lombok, bertambah lagi 10 sekolah perencana. Kemudian kongres yang terakhir untuk sementara ini ialah kongre ASPI X pada tahun

2019 yang diselenggarakan di Universitas Tanjungpura-Pontianak, bertambah lagi 8 sekolah perencana. Sehingga total jumlah anggota ASPI saat ini ialah 74 sekolah perencana. Kongres berikutnya yang ke XI yakni dengan tuan rumah Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Universitas Hindu Indonesia-Bali yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2021.

Selain kongres yang dilakukan setiap 2 tahun, setiap tahunnya juga dilakukan pertemuan tahunan yang biasanya dilakukan bersamaan dengan seminar nasional. Di tahun 2012 pertemuan tahunannya ialah di ITB Bandung, di tahun 2014 di Universitas Islam Riau-Pekanbaru, di tahun 2016 di Universitas Andalas-Padang, di tahun 2018 di Universitas Pakuan dan Institut Pertanian Bogor dan pertemuan yang terakhir untuk sementara ini ialah di tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring dengan tuan rumah Universitas Syiah Kuala-Banda Aceh.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh ASPI diantaranya yakni Workshop kompetensi lulusan dan pendidikan S-1, S-2, dan S-3, Kerjasama, Akreditasi, Metoda pembelajaran pendidikan, Kompetensi KKNI, APSA International Congress, Penghargaan karya terbaik studio, Kurikulum, Prepcom 3 Habitat III, 14<sup>th</sup> International Congress of Asian Planning School Association, Capaian pembelajaran, World urban forum 9, 4<sup>th</sup> Planocosmo International Conference, Kerjasama studio, 15<sup>th</sup> APSA Congress 2019, Kerjasama dengan ATR/BPN, Pelaksanaan diklat penyusunan RDTR, Sosialisasi akreditasi IAPS 4.0, Persiapan implementasi kebijakan kampus merdeka, Kerjasama IAP: Link and match pendidikan dan profesi perencana, Sosialisasi dan pembahasan RPP penyelenggaraan penataan ruang, Sosialisasi dan pembahasan RPP UU Cipta Kerja Bidang Perumahan dan juga yang terakhir untuk sementara ini ialah Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Organisasi terkait PWK di Indonesia selain ASPI, ialah Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia. IAP berfungsi sebagai wadah pembinaan profesi, komunikasi, konsultasi, penelitian dan pengembangan, dan koordinasi antar ahli PWK, juga antar ahli PWK dengan ahli lainnya, swasta, lembaga masyarakat, pemerintah dan dunia internasional. Apabila asosiasi akademisi yakni ASPI dibentuk sekitar tahun 90-an, maka IAP sebagai asosiasi profesi terbentuk lebih awal lagi yakni di awal dekade 70-an. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada website [www.iapindonesia.org](http://www.iapindonesia.org). Sebelum namanya ahli perencanaan, planner pada saat dulu menyebut diri sebagai Ikatan Ahli Perancang, terbentuk tepatnya pada tahun 13 April 1971 di Jakarta oleh para alumni Planologi ITB.

IAP merupakan organisasi profesi PWK tertua dan terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara yang memiliki anggota lebih dari 2.500 planner dengan kurang lebih 1.500 diantaranya bersertifikat LPJKN dan tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, tepatnya 26 kepengurusan provinsi. Program IAP untuk meningkatkan fungsi organisasi dan memfasilitasi pengembangan dan kemajuan di masa yang akan datang diantaranya yakni Inovasi dan advokasi, IAP Talks, Senior planner forum, Smart membership, Most livable city, Sertifikasi perencana, Continous Professional Development (CBD), Kerjasama nasional dan internasional dan juga Young planning professionals (YPP).

Perkembangan PWK di Indonesia tidak lepas dari perkembangan organisasi-organisasi seperti yang telah penulis paparkan secara singkat yakni ASPI dan IAP. Selain itu juga terdapat organisasi lain, tetapi ditangani oleh para mahasiswa yakni Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia (IMPI). Kedepannya keanggotaan dari ASPI maupun IAP akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya alumni atau lulusan dari bidang PWK di seluruh Indonesia dan juga semakin pesatnya perkembangan jurusan dan juga program studi PWK baru di wilayah lainnya. Selain itu dengan terbitnya Permen ATR 15



2021 terkait pembentukan FPR, peran asosiasi profesi yakni IAP dan asosiasi akademisi yakni ASPI seperti yang tertuang dalam peraturan tersebut sangat penting kedepannya.

### **Perkembangan PWK Di Provinsi Maluku**

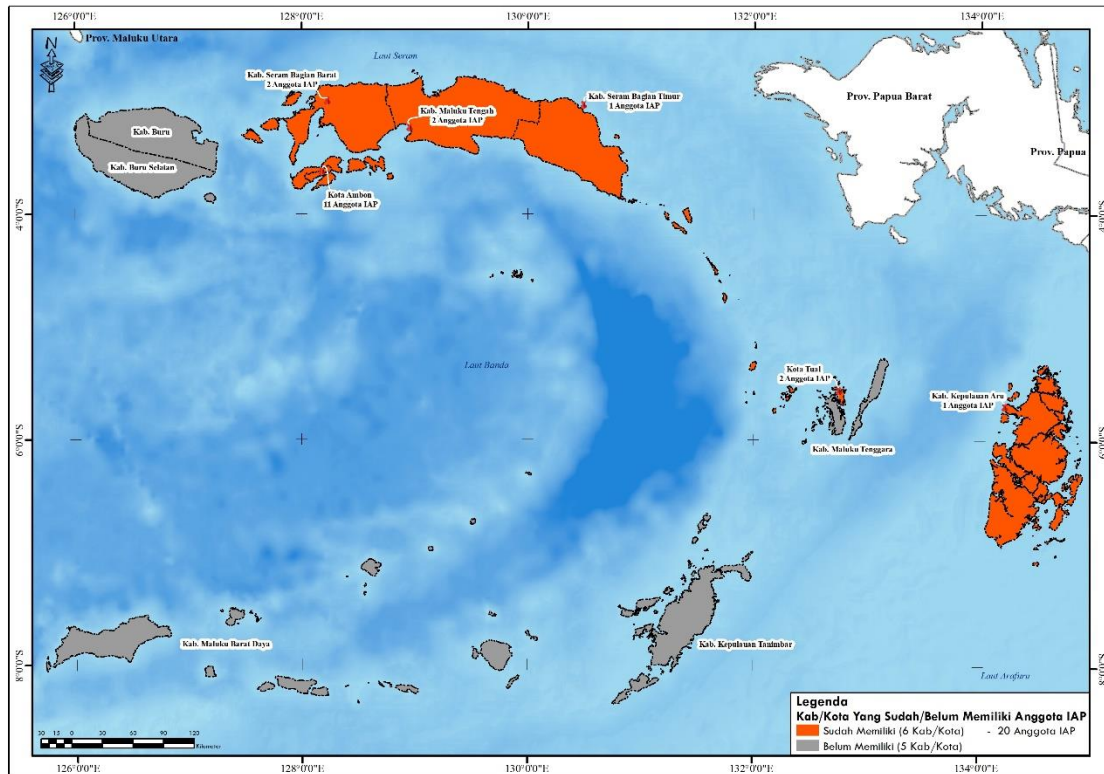
Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi yang terletak di wilayah bagian timur Indonesia dengan luas wilayah, 46.914,03 km<sup>2</sup> dengan kurang lebih memiliki 1.392 jumlah pulau. Terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, yakni Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah penduduk 1.848.923 jiwa.

Provinsi Maluku telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku tahun 2013-2033. RTRW Maluku yang telah diperdakan sejak tahun 2013 harusnya di tahun saat ini yakni 2021, telah selesai peninjauan kembali yang menurut aturan setiap 5 tahun sekali dilakukan. Dikutip dari [www.tataruang.atrbpn.go.id](http://www.tataruang.atrbpn.go.id) tanggal 4 Mei 2018, dengan berita berjudul Seluruh Daerah Di Provinsi Maluku Diperkirakan Akan Menempuh Revisi RTRW, harapannya PK RTRW telah selesai dan diperdakan agar dapat menjadi acuan dalam pembangunan di Provinsi Maluku maupun untuk 11 Kabupaten/Kota. Permasalahan yang penulis dapatkan terkait RTRW dan juga RDTR ialah hanya menjadi dokumen pelengkap sebagai syarat administrasi dari suatu daerah. Padahal, dokumen tata ruang sangat penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga masalah-masalah yang telah dianalisis dan direncanakan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

Selain itu, Provinsi Maluku yang kurang lebih 90% wilayahnya ialah lautan sehingga perencanaannya perlu dilakukan dengan fokus untuk memaksimalkan potensi pesisir dan juga wilayah lautnya. Adisasmita (2015), menyampaikan para perencana kurang memperhatikan pembangunan wilayah kepulauan, kelautan dan wilayah maritim padahal di laut terdapat kekayaan sumber daya kelautan yang memiliki potensi yang sangat besar, sehingga tidak salah apabila muncul semboyan “go to the sea” (marilah membangun menuju ke laut) dan sea lead growth yang berarti sektor kelautan sebagai penarik pertumbuhan pembangunan di masa yang akan datang.

Perkembangan PWK di Provinsi Maluku dimulai dengan dibukanya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Pattimura pada tahun 2014 serta terbentuknya organisasi profesi yakni Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Provinsi Maluku pada tahun 2019. Perkembangan planner di Maluku telah dimulai sejak lama ketika para mahasiswa dari Maluku menuntut ilmu bidang perencanaan wilayah dan kota di Yogyakarta, Makassar, Malang, Bandung dan daerah lainnya di Indonesia sejak tahun 1990-an hingga saat ini. Hal ini telah terdapat dalam tulisan opini oleh Botanri (2021), dikutip dari [www.terasmaluku.com](http://www.terasmaluku.com).

Berdasarkan data anggota IAP-Maluku, para planner juga tersebar di beberapa daerah di Provinsi Maluku seperti di Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru dan juga Kabupaten Maluku Tengah. Profesi planner Maluku juga beragam yakni Dosen, PNS, Konsultan Perencana serta profesi lainnya bahkan sudah ada yang memiliki tingkat keilmuan S-2 dari Universitas besar di Indonesia seperti UGM, Unhas dan ITB. Untuk lebih jelasnya terkait peta sebaran anggota IAP Maluku, dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1. Peta Sebaran Anggota IAP Maluku**

Beberapa kegiatan besar IAP-Maluku yang pernah dilakukan ialah Diskusi Publik “Mitigasi Bencana Berbasis Penataan Ruang dan Pembangunan Berkelanjutan”, paska musibah bencana gempa di Provinsi Maluku pada bulan September tahun 2019 dengan magnitudo 6,8 SR. Untuk kegiatan tersebut IAP-Maluku mengundang beberapa pembicara diantaranya yakni Ir. Bernardus Djonoputro yang saat itu merupakan Ketua Umum IAP-Pengurus Nasional, Dr. Djalaludin Salampessy, Abdul Halil Kastella, S.T., dan Dr. Ferad Puturu. Kemudian kegiatan lainnya yakni Link and Match Pendidikan dan Perencanaan antara IAP dan ASPI. Kegiatan lainnya ialah Pelatihan Ahli PWK bekerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku. Para pemateri pada saat kegiatan tersebut ialah Ketua Umum IAP Nasional dan Sekretaris Jenderal, Ketua IAP Maluku, dosen ITB, dosen ITS dan dosen UI.

Dengan semakin berkembangnya bidang perencanaan wilayah dan kota di Provinsi Maluku, harapannya perencanaan terkait penataan ruang di seluruh daerah di Maluku dapat menjadi lebih baik. Pelibatan tenaga ahli dari IAP Maluku dalam setiap pekerjaan juga diharapkan dapat difasilitasi Organisasi Perangkat Daerah di Maluku karena melihat produk tata ruang yang telah ada terkesan dikerjakan kurang maksimal. Hal ini seperti yang disampaikan Heryanto (2011) yakni konsep berpikir secara global tetapi bertindak secara lokal, “Think Globally Act Locally”, mungkin masih relevan untuk dikaji dan diterapkan dalam proses perencanaan dan perancangan kota saat ini. Selain itu planner yang ada di Maluku juga sudah terdapat beberapa orang yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan juga Ketua Umum IAP Indonesia juga telah mengingatkan planner yang tidak bekerja dengan baik dapat dicabut SKA-nya. Selain itu, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 terkait pembentukan Forum Penataan

Ruang (FPR) yang nantinya turut melibatkan asosiasi profesi (IAP), asosiasi akademisi (ASPI), asosiasi lain yang terkait dan tokoh masyarakat bersama OPD terkait seperti yang disampaikan Bapak Direktur Jenderal Tata Ruang dan Bapak Menteri ATR/BPN.

Dengan dibentuknya FPR tersebut, diharapkan pekerjaan terkait penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan pekerjaan terkait tata ruang lainnya dalam ruang lingkup Kota, Kabupaten dan Provinsi di Maluku agar dapat melibatkan tenaga lokal karena terdapat alumni PWK dari seluruh Indonesia, serta nantinya terdapat alumni PWK Universitas Pattimura yang akan berkiprah dalam dunia perencanaan di Provinsi Maluku sehingga akan terjadi regenerasi kelimuan untuk merencanakan ruang agar dapat menciptakan ruang yang aman dan nyaman di seluruh daerah di Provinsi Maluku. Hal ini seperti yang disampaikan Hamzens (2018) yakni planner nusantara, bekerjalah dengan optimis, dengan semangat perencana yang kritis, kreatif, dan tanggap demi kebaikan bangsa saat ini dan untuk mewariskan ruang yang aman dan nyaman bagi kehidupan generasi mendatang.

Selain itu Provinsi Maluku juga sama dengan daerah lain di Indonesia yang sedang dilanda wabah pandemi virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-Cov-2) atau disebut juga Covid-19. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang cepat, tingkat kematian yang tidak bisa diabaikan, dan juga belum terdapat terapi definitif (Susilo, 2020). Jumlah masyarakat Maluku yang terpapar covid-19 juga tinggi sehingga sebagian besar Kabupaten/Kota masuk ke zona merah dengan total kasus hingga saat ini ialah 12.716 jiwa dengan 211 jiwa yang telah meninggal, bahkan berdasarkan berita dari [www.regionalkompas.com](http://www.regionalkompas.com), pada awal Juli yang lalu terjadi rekor tertinggi kasus yakni sebanyak 278 dalam sehari. Peran planner Maluku di masa pandemi juga sangat diperlukan untuk membuat rencana penataan ruang yang baik, karena menurut penulis, apabila setiap ruang sudah ditata dengan baik, otomatis dengan kondisi pandemi, pemerintah tidak akan terlalu sulit dalam melakukan pengaturan jarak antar orang dalam beraktivitas.

Beberapa hal yang dapat dilakukan sesuai arahan Dirjen Tata Ruang diantaranya ialah yang pertama dengan konsep high density yakni membuat rencana penyediaan akses menuju fasilitas pelayanan publik dasar dengan mudah dijangkau masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Perhitungan kebutuhan prasarana dan sarana dasar dalam suatu wilayah sangat penting untuk menerapkan konsep ini. Hal kedua yang dapat dilakukan ialah melakukan rencana penyesuaian ruang publik dan jaringan transportasi yang baik untuk Non Motorized Transport seperti sepeda, berjalan kaki, dan yang lainnya, demi mengurangi kepadatan. Hal lain yang dapat dilakukan ialah seperti yang terdapat di dalam Botanri (2021) terkait rencana sarana pengolah limbah B3 covid-19 di Kota Ambon. Kota Ambon sebagai pusat dari Provinsi Maluku yang otomatis merupakan wilayah terpadat sehingga menjadi wilayah tertinggi kasus covid-19. Penentuan lokasi sarana pengolah limbah perlu dilakukan dengan pertimbangan tertentu seperti dengan melakukan analisis kesesuaian lahan terlebih dahulu, kemudian melakukan analisis buffer atau jangkauan untuk menentukan lokasi yang tepat dengan jarak minimal 500 meter dari permukiman masyarakat. Beberapa hal yang dibahas diatas sebagai rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Maluku terkait covid-19 dan penataan ruang.



## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota bukanlah bidang keilmuan yang baru apabila ditelusuri sejarah penataan ruang di Indonesia. Untuk praktik perencanaannya dipengaruhi beberapa faktor yakni 1) Perkembangan paradigma perencanaan di dunia; 2) Perubahan pemerintahan; 3) Perkembangan pendidikan dan pelatihan perencanaan; 4) Pengaruh dari aliran perencanaan luar negeri; 5) Perkembangan kelembagaan perencanaan; dan 6) Perkembangan peraturan perundang-undangan perencanaan. Yang kedua yakni perkembangan PWK di Indonesia dimulai dengan dibukanya jurusan PWK di ITB sebagai universitas pertama di Indonesia dengan bidang perencanaan yang hingga saat ini telah mencapai 74 sekolah perencana dengan tingkatan S-1, S-2 dan S-3 yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan data keanggotaan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Organisasi terkait bidang PWK lain selain ASPI ialah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia yang merupakan organisasi profesi PWK tertua dan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Peran asosiasi profesi yakni IAP dan asosiasi akademisi yakni ASPI kedepannya sangat penting seperti yang tertuang dalam Permen ATR 15 2021 terkait Forum Penataan Ruang. Yang ketiga yakni perkembangan PWK di Maluku dimulai dengan dibukanya program studi PWK pada Universitas Pattimura dan merupakan satu-satunya prodi PWK di Provinsi Maluku serta terbentuknya IAP Maluku di tahun 2019. Peran planner di Maluku kedepannya diharapkan dapat membantu dalam perencanaan-perencanaan di daerah terutama ditengah kondisi pandemi covid-19. Beberapa hal yang dapat dilakukan yakni dengan konsep high density, melakukan rencana penyesuaian ruang publik serta jaringan transportasi untuk Non Motorized Transport dan juga rencana sarana pengolahan limbah B3 covid-19 di Kota Ambon.

Saran dari tulisan ini ialah penulis berharap Pemerintah Daerah dapat turut membantu dalam perkembangan bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota di Provinsi Maluku dengan membuka kesempatan Kerja Praktek serta pembinaan mahasiswa dengan baik, agar kedepannya mereka dapat memberikan kontribusi besar kepada daerah. Selain itu juga pelibatan para ahli perencana di daerah dalam membantu pekerjaan penataan ruang seperti RTRW, RDTR, KLHS dan pekerjaan terkait perencanaan ruang lainnya sangat diharapkan karena semangat merencanakan antara perencana dari daerah sendiri dan bukan, akan berbeda pada hasil akhirnya. Yang terakhir agar selain melibatkan perencana, juga melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang dalam hal perencanaan di suatu daerah. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar dapat terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2015. Analisis Pembangunan Wilayah; Kepulauan, Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Archipelago dan Semeja. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi Maluku Dalam Angka.
- Botanri, A. A. A. 2021. Peran Planner Dan Rekomendasi Ke Pemerintah Daerah Untuk Penataan Ruang Maluku Yang Lebih Baik. Tersedia pada: <https://terasmaluku.com/peran-planner-dan-rekomendasi-ke-pemerintah-daerah-untuk-penataan-ruang-maluku-yang-lebih-baik/>.

- Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2018. Seluruh Daerah Di Provinsi Maluku Akan Menempuh Revisi RTRW. Tersedia pada: <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3384>.
- Djunaedi, A. 2012. Proses Perencanaan. Wilayah Dan Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djunaedi, A. 2014. Pengantar Perencanaan Wilayah Dan Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Widyawan, Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A., Egaravanda, S. 2018. Membangun Kota Dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan Bagi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzens, W. P. S. 2018. Motivasi Pembangunan. Master Plan.
- Heryanto, B. 2011. Roh Dan Citra Kota; Peran Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik. Surabaya: Brillian Internasional.
- Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muta'ali, L. 2011. Kapita Selekta Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Muta'ali, L. 2013. Penataan ruang Wilayah Dan Kota (Tinjauan Normatif-Teknis). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Patty, R. R. 2021. Rekor Tertinggi di Maluku, 278 Kasus Covid-19 dalam Sehari. Tersedia pada: <https://regional.kompas.com/read/2021/07/05/155906278/rekor-tertinggi-di-maluku-278-kasus-covid-19-dalam-sehari?page=all>.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Somantri, G. R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara, Sosial Humaniora Volume 9 Nomor 2.
- Susilo, A., dkk. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Volume 7 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.